



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023 (LKJIP 2023)

BPBD KABUPATEN REMBANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang telah selesai. LKJIP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Rembang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Kabupaten Rembang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKJIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, Januari 2024

 Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rembang
SRI GARWATI, M.Pd., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660826 198806 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	5
1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	13
1.4. Landasan Hukum	15
1.5. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis 2022-2026.....	16
2.2. Perencanaan Kinerja.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP.....	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Rekomendasi	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022	11
Tabel 1.2	Data Sarana dan Prasarana Tahun 2022	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran 2022-2026	18
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022	20
Tabel 2.4	Program Kegiatan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022	21
Tabel 3.1	Perhitungan Kinerja Sasaran Strategis	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	25
Tabel 3.3	Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	26
Tabel 3.4	Capaian IKU dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan terhadap Target RPJMD.....	27
Tabel 3.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	28
Tabel 3.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	28
Tabel 3.7	Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2022	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang.....	10
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak-hak untuk bebas dari rasa takut terhadap ancaman dan resiko bencana. Penanggulangan bencana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja 2023 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.

A. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta penanggulangan kebakaran secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan penanggulangan bencana dan sub urusan penanggulangan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik yang terdiri dari kedaruratan serta logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi.

Adapun fungsi Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Pemadam Kebakaran

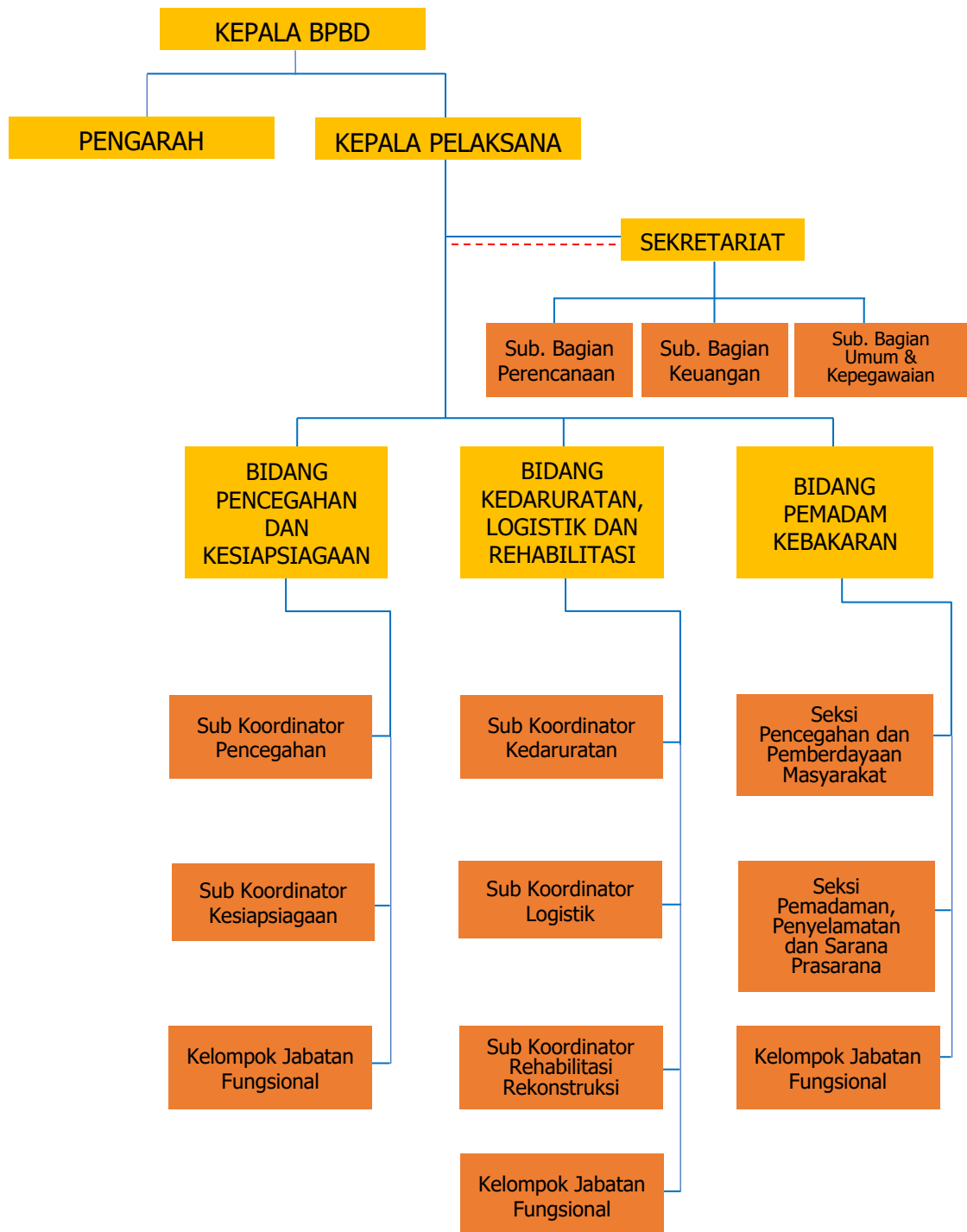
Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran yang terdiri dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Adapun fungsi Bidang Pemadam Kebakaran adalah:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana bagan di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang

Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021

C. Susunan Kepegawaian

Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2023

NO	DATA PEGAWAI	PNS		NON PNS		P3K	
		L	P	L	P	L	P
1	Kualifikasi Pendidikan						
	SD	-	-	-	-	-	-
	SMP	5	-	-	-	-	-
	SMA	15	-	-	-	9	-
	D3	1	2	-	-	-	-
	D4	2	-	-	-	-	-
	S1	10	3	-	-	-	-
	S2	2	2	-	-	-	-
2	Pangkat dan Golongan						
	Non Golongan	-	-	-	-	-	-
	Golongan I	1	-	-	-	-	-
	Golongan II	13	1	-	-	-	-
	Golongan III	15	5	-	-	-	-
	Golongan IV	6	1	-	-	-	-
	Golongan V	-	-	-	-	9	-
3	Jumlah Pejabat						
	Pejabat Struktural	7	3	-	-	-	-
	Pejabat Fungsional	4	1	-	-	-	-
	Jumlah Pegawai	35	7	-	-	-	-
	Jumlah Total Pegawai	42				9	

D. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang per Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah	Merk	Kondisi
I. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.	Laptop	1	Lenovo pad flex 14-59412881 IPK	Baik
2.	Laptop	1	Asus A450LCWX048D Gray MTD	Baik
3.	Laptop	2	HP	Baik
4.	Laptop	1	Acer	Baik
5.	Laptop	1	Tosiba L40 intel core i5	Baik
6.	Laptop	1	Tosiba L40 intel core i5	Baik
7.	Laptop	1		Baik
8.	Printer	1	HP Laser CIR 1025	Baik
9.	Printer	1	Brother	Baik
10.	Printer	1	Laserjet hp p1102+ catride toner	Baik
11.	Printer	2	Epson Stylus T60	Baik
12.	Printer	3	Epson	Baik
13.	Printer	1	Epson ME 32	Baik
14.	Printer	1		Baik
15.	Printer Portable	1	HP	Baik
16.	Printer	1	Epson L5290	Baik
17.	Scanner	1	1221 scan AS 1213	Baik
18.	PC Unit	2	Acer, Core i3, 4130,2gb,HDD 500 gb wi fi DVD RW, LED 19,5"	Baik
19.	PC Unit	1	Asus Power Logic H61 ITERA 2GB LCD SAMSUNG 19"	Baik
20.	Tablet/Komputer	1	Lenovo	Baik
21.	Meja kerja Staf	5		Baik
22.	Meja rapat	10		Baik
23.	Meja rapat oval	1		Baik
24.	Meja kursi tamu Eselon III	3		Baik
25.	Meja panjang	1		Baik
26.	Meja setengah lingkaran	1		Baik
27.	Meja Komputer	1		Baik
28.	Meja Kerja	5		Baik
29.	Meja Podium	1		Baik
30.	Kursi kerja staf/putar	5	Tiger	Baik
31.	kursi rapat	6		Baik
32.	Kursi lipat	25		Baik
33.	Kursi Kerja	8		Baik
34.	Almari tanpa	1		Baik

No.	Uraian	Jumlah	Merk	Kondisi
	kaca/Bufet			
35.	Almari Arsip	1		Baik
36.	Almari Pajangan	2		Baik
37.	Rak Kayu	4		Baik
38.	Rak Koran	1		Baik
39.	Hiasan dinding batik besar	1	Hiasan dinding	Baik
40.	Hiasan dinding batik kecil	2	Hiasan dinding	Baik
41.	Pemotong rumput	1	Honda	Baik
42.	Gorden,taplak meja	1		Baik
43.	Rice cooker	2	Cosmos CRJ 326	Baik
44.	Ac Split	4	LG	Baik
45.	Ac Split	4	Daikin	Baik
46.	Laptop	1	Acer Aspire 5	Baik
47.	Laptop	1	Lenovo	Baik
48.	WC Portable	2		Baik
II. Alat Studio dan Alat Komunikasi				
1	Sound System	1	Sound crest SC EBL 15A	Baik
2	Handycam	1		Baik
3	Camera Elektronik	1	Panasonic FZ 47"	Baik
4	Drone	1	Mi	Baik
5	Repeater	1		
6	HT	38		
7	Rig	1		
III. Alat Keamanan				
1.	SCUBA / alat selam	1		Baik
2.	SCBA /jarring	1		Baik
3.	Basket Stretcher	1		Baik
4.	Action Camera	1		Baik
5.	Senter Tactical	2		Baik
6.	Las Listrik	1		Baik
7.	Bor	1		Baik
8.	Gerindra	1		Baik
9.	Kompresor	1		Baik
10.	Antena HT	10		Baik
11.	Megaphone	2		Baik
12.	Chainsaw	10		Baik
IV. Aset Tetap Lainnya, Buku dan Perpustakaan				
1	Buku Peraturan	1		Baik
V. Transportasi				
1.	Kendaraan Roda 2	21		Baik
2.	Kendaraan Roda 4			Baik
	Operasional	4		
3.	Mobil Pick Up	2		Baik
4.	Mobil Tangki Air			Baik
	Bersih+Pemadam	4		
5.	Truk Pemadam	5		Baik

1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Rembang telah menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022–2026. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja per tahunnya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rencana Kerja Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
					2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah			0,59
			Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	79%
			Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	85%

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran menyebabkan belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
2. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
3. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
4. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang;
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
6. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;
7. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;

8. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar;
9. Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar.

1.4. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

1.5. Sistematika

Sistematika penulisan LKJIP BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2022-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2022-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahun 2023.

1. Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2022-2026 adalah sebagai berikut:

“Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai

sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

2. Misi

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026, telah dirumuskan empat Misi. Salah satu dari empat rumusan Misi tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Misi I. Misi I mengamanatkan untuk “*Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi*”. Dalam melaksanakan Misi I, telah dijabarkan melalui penetapan tujuan yaitu Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Bencana Daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I, selanjutnya tujuan ini dijabarkan kembali menjadi sasaran yang ingin dicapai, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan

fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya

BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond*, dan *continuously improve (SMART-C)*. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai BPBD Kabupaten Rembang berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra BPBD Tahun 2022-2026 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	74%	79%	84%	89%	94%
		Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	80%	85%	85%	90%	90%

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Perencanaan Kinerja BPBD Kabupaten Rembang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,59	
		1.1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	%	79
		1.2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	85

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini, perjanjian kinerja dilakukan antara Bupati dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata antara Kepala Pelaksana BPBD Rembang dengan Bupati Rembang selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang pada Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	%	79
2	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	85

Setiap sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah direncanakan maka telah ditetapkan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Program Kegiatan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.640.085.502
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD BPBD Nilai SAKIP OPD BPBD	77 Angka 73 Angka	5.677.585.502
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	200.425.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	425.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	200.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	4.102.305.602
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/bulan	4.046.133.602
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	56.172.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100%	144.729.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.807.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.694.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.619.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.118.000
Penyediaan Bahan / material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	13.915.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.575.900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	779.198.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.561.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	118.700.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Laporan	6.267.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	652.670.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	450.927.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	128.574.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	12.925.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	309.428.500
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana % penanganan kejadian bencana	32% 100 %	909.181.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	170.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	4200 orang	170.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kawasan Tempat Tinggalnya		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	550.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 Orang	0
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13 Kawasan	350.000.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	300 Orang	200.000.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0 Orang	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	152.100.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling OLama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	20.650.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	131.450.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	37.081.000
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	10 Dokumen	37.081.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rembang % sarana prasarana pemadam kebakaran yang representatif	30 % 30 %	2.993.140.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamaan evakuasi korban kebakaran	85%	2.713.498.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	224.545.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	2.417.255.000
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100 Orang	71.698.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	jumlah anggota relawan yang terlatih	80%	339.821.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang Presentase pemenuhan sarana dan prasarana damkar	250 orang	323.600.000
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan	5 Desa	16.221.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Kabupaten Rembang. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 – 64,99%;
- e. Sangat Kurang : < 50, %

BPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana perjanjian kinerja dan rencana strategis. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini,

yaitu meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan kapasitas ketangguhan bencana daerah mendapatkan angka capaian kinerja sasaran (rata-rata) sebesar 106,7% dengan predikat “Sangat Baik” yang diukur melalui indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perhitungan Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2023	% Capaian 2022	RPJMD	
	2023	2023			Target Akhir 2023	% Capaian s/d 2023
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} * 100\%$	5	7	2
Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,63	106,7%	Na	0,59	0,63
Rata-rata Capaian			106,7%	Na		

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,63	106,7%	Baik	BPBD
2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	79%	77%	97%	Baik	BPBD
3	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	85%	85%	100%	Baik	BPBD

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Ketahanan Daerah dari target 0,59% Realisasi 0,63% capaian indikator sasaran kinerja 106,7% kategori penilaian Sangat Baik.
2. Persentase penanganan bencana daerah dari target 79% Realisasi 77% capaian indikator sasaran kinerja 97% kategori penilaian Baik.
3. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran dari target 85% Realisasi 85% capaian indikator sasaran kinerja 100% kategori penilaian Baik .

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 rata-rata: 101,2%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 3 (tiga) tahun terakhir;

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan *indicator benefit* dan *impact* diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2023, termasuk kategori sangat berhasil.

Perbandingan antara Target, realisasi serta capaian Renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Na	Na	Na	0,57	0,55	96%	0,59	0,63	106,7%
2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	Na	Na	Na	74%	73,44%	99,1%	79%	77%	97%
3	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Na	Na	Na	80%	80%	100%	85%	85%	100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta tugas pembantuan di Kabupaten Rembang, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (tahun 2026) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian IKU dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,65	3,2%
2.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	77%	94%	22,07%
3.	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan	85%	90%	5,8%

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Rembang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	0,59	0,63	106,7%	9.640.085.502	9.069.946.556	94,08	5,92
	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	79%	77%	97%	909.181.000	766.298.990	84,28	15,72
	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	85%	85%	100%	2.993.140.000	2.979.213.000	99,53	0,47

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Anggaran tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk mengetahui hasil yang dicapai dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	106,7%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	105,9	Menunjang
					Nilai IKM	102,3	Menunjang
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% penanganan kejadian bencana	100	Menunjang
					% desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	72	Menunjang
				PROGRAM PENCEGAHAN,	cakupan pelayanan	263	Menunjang

				PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	bencana kebakaran di Kabupaten Rembang % sarana prasarana pemadam kebakaran yang representatif	100	Menunjang
	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	97%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% penanganan kejadian bencana % desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	100	Menunjang
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan dan	100%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rembang % sarana prasarana pemadam kebakaran yang representatif	263	Menunjang
						100	Menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 9.640.085.502,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 9.069.946.556,- atau (94,08 %), sehingga terdapat efisiensi sebanyak 5,92%.

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.640.085.502	9.069.946.556	94,08
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.677.585.502	5.324.434.566	93,77
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.425.000	167.183.300	83,41
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.102.305.602	3.835.273.818	93,49
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.729.900	143.107.600	98,87
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	779.198.000	743.258.648	95,38
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.927.500	435.611.200	96,60
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	909.181.000	766.298.990	84,28
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	170.000.000	90.791.500	53,40
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	550.000.000	511.306.500	92,96
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	152.100.000	128.285.000	84,34

4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	37.081.000	35.915.990	96,85
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.993.140.000	2.979.213.000	99,53
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.713.498.000	2.665.744.000	98,24
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	339.821.000	313.469.000	92,24

Efisiensi dan optimalisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
2. Rasionalisasi/optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Efisiensi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pengelola keuangan dan juga penyesuaian anggaran sehingga diperoleh optimalisasi sumberdaya dengan tidak mengurangi target namun hemat dalam penggunaan sumberdaya keuangan. Pengadaan bahan baku bangunan terkendala dengan tempat penampungan yang belum ada dan aturan yang tidak memperbolehkan menyetok barang. Belanja bahan logistik di kurangi dikhawatirkan terlalu banyak tertimbun di gudang menjadi rusak/*expired*.

4.2. Rekomendasi

Menyikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa rekomendasi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan penanggulangan bencana, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana dengan potensi/risiko tinggi;
2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan beserta baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah, sehingga kegiatan menjadi lebih akuntabel dan transparan;

3. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha. Dunia usaha perlu didorong untuk meningkatkan peran dalam PB sejak pra bencana.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang dan DPRD Kabupaten Rembang untuk mengalokasikan anggaran yang tepat pada upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga, dunia usaha terutama untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat. Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di berbagai lembaga usaha juga dapat dikelola sebagai bagian dukungan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.
6. Melakukan koordinasi dengan desa agar mengalokasikan anggaran desa untuk kebencanaan, mengingat bencana adalah tanggungjawab bersama.
7. Penambahan anggaran pada program kegiatan SPM kebencanaan untuk tercapainya pemenuhan pelayanan dasar kebencanaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Rembang



BPBD
SRI HARWATI, M.Pd., MH.
Pembina Utama Muda
NIK 19640826 198806 2 001